

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan memiliki wilayah yang luas. Negara ini juga menjadi negara yang banyak didatangi oleh para wisatawan. Selain itu, Thailand juga menjadi negara dengan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik di antara negara Asia Tenggara.

Dalam permasalahan lingkungan, menjadi penting menjaga lingkungan itu sendiri dari kerusakan yang sering terjadi akibat berbagai faktor. Sebab kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan dampak terhadap sosial, budaya, ekonomi, ekologis, kerusakan lingkungan, hubungan antar negara, perhubungan dan pariwisata (Rumajomi, 2006, p. 8). Selain itu, dampak dari dari kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap telah menimbulkan kerugian di berbagai sektor, diantaranya: kesehatan, lingkungan, perekonomian, pariwisata, dan transportasi. Sehingga dengan adanya dampak terhadap lingkungan, kebakaran hutan di Indonesia telah memberikan dampak pada lingkungan secara signifikan. Di mana akibat hal tersebut menimbulkan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Suryani, 2012, p. 63).

Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh adanya deforestasi yang dilakukan dengan tujuan ingin membuka lahan. Selain itu, kabut asap ini terjadi karena kebakaran hutan di wilayah Indonesia juga menimbulkan dampak negatif dan kerugian di berbagai sektor (Suryani, 2012, p. 64). Sehingga isu-isu deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia sering terjadi setiap tahun dengan intensitas kebakaran hutan yang tinggi. Di mana Thailand merupakan negara yang terkena dampak dari permasalahan lingkungan yang terjadi yaitu kabut asap lintas batas negara.

Permasalahan-permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Dampak dari deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi akan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu, akibat dari adanya deforestasi dan kebakaran hutan tersebut telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan. Di mana kebakaran hutan di Indonesia mulai terjadi dan tercatat sejak abad ke-19 (Varkley, 2013, p. 201). Sehingga kebakaran hutan ini telah menjadi masalah tahunan bagi Indonesia. Sedangkan bagi Thailand, kabut asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia juga menjadi masalah dalam beberapa tahun terakhir.

Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan memiliki hutan yang luas dan telah lama dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, dari hutan yang dimiliki tersebut menimbulkan permasalahan yang sering terjadi yaitu deforestasi dan kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seringkali sebagian besar disebabkan yang menjadi penyebabnya yaitu manusia yang dengan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan (Tanjung, 2016). Apalagi akibat adanya deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan kabut asap lintas batas negara. Sehingga hal tersebut telah menjadi isu lingkungan dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2015, kasus kebakaran hutan merupakan bencana paling buruk yang menimpa enam dari sepuluh negara anggota ASEAN, termasuk Thailand Selatan dan Vietnam (Singapore Institute of International Affairs, 2016, p. 2). Di mana dampak bagi Thailand akibat kabut asap tersebut membuat industri pariwisata Thailand bermasalah. Sehingga dampak dari kabut asap yang merambah wilayah Thailand Selatan membuat pemerintah Thailand khawatir terhadap

permasalahan tersebut. Namun, wilayah Thailand itu sendiri memang tidak lepas dari dampak kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Sebab dampak terburuk bagi Thailand yang diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia yaitu tahun 2015. Misalnya dampak dari kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 menyebabkan pemerintah Thailand menutup penerbangan sejumlah pesawat (Kompas, 2015).

Di sisi lain, baik Thailand maupun Indonesia merupakan negara yang telah menyetujui perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Perjanjian ini adalah perjanjian lingkungan semua anggota ASEAN dengan tujuan untuk mengurangi polusi kabut asap. Perjanjian tersebut akhirnya mulai berlaku pada November 2003. Perjanjian tersebut dianggap sebagai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara tetangga untuk mengatasi masalah pencemaran kabut lintas batas akibat kebakaran lahan dan hutan. Namun, adanya deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan timbulnya kabut asap dan polusi udara yang telah menimbulkan dampak ke beberapa negara di Asia Tenggara.

Dengan demikian, Thailand berusaha mengatasi dampak dari kabut asap yang terjadi dengan menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Sebab akibat permasalahan kabut asap ini membuat hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia menjadi terganggu. Akan tetapi, pada dasarnya dalam bidang kerja sama bilateral, hubungan antara kedua negara selama ini masih berjalan dengan baik. Kedua negara ini secara bersama-sama bekerja sama dalam menangani permasalahan kebakaran lahan yang terjadi. Pemerintah Thailand melakukan upaya dengan menawarkan beberapa solusi kepada pemerintah Indonesia. Sehingga kedua negara ini bekerja sama dalam menangani permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu: **Mengapa Thailand berupaya mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dengan menggunakan *decision making*?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini skripsi ini, penulis memiliki tujuan yaitu:

- Untuk menganalisis, memaparkan, dan mengkaji terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) sehingga dapat mengetahui kepentingan, respon, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Thailand dalam menangani kasus tersebut dengan melalui kerja sama antara Thailand dan Indonesia.

1.4 Signifikansi

Dalam penelitian ini, judul dan rumusan masalah yang akan dibahas sangat relevan terhadap fenomena yang terjadi dalam studi hubungan internasional. Oleh karena itu, penulis berharap nantinya penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga menurut penulis, penelitian ini dapat memiliki manfaat, yaitu:

- Dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang memiliki minat dalam hubungan internasional terkait hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia, khususnya terhadap analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

- Dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi semua pihak, khususnya kalangan mahasiswa yang memiliki minat penelitian terkait kerja sama antara Thailand dan Indonesia, khususnya dalam analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

1.5 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dengan menggunakan topik/isu yang diangkat memfokuskan penelitian terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Di mana dampak deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia membuat hubungan bilateral antara Thailand dan Indonesia terus terganggu. Sebab sejak terjadinya kebakaran hutan di Indonesia yang menyumbang asap ke beberapa negara Asia Tenggara telah mendapatkan respon dari negara-negara yang terkena dampaknya. Sehingga respon tersebut dapat menyebabkan hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara terganggu, khususnya Thailand yang diakibatkan oleh dampak kabut asap kiriman dari Indonesia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Selain itu, meskipun ada beberapa penelitian yang sudah membahas penelitian dalam menangani kasus deforestasi dan kebakaran hutan melalui organisasi internasional ASEAN, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu lebih fokus pada analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Dimana dengan adanya upaya tersebut dapat membangun hubungan

kerja sama antara kedua negara dalam menangani kasus tersebut yang dapat berdampak positif ke berbagai bidang. Penelitian merupakan penelitian yang relevan terkait hubungan kerja sama kedua negara ini. Selain itu, dalam penelitian ini penulis memiliki batasan waktu, yaitu dari tahun 2015-2018. Sebab pada tahun 2015-2018 permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia sangat tinggi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian yang akan dibahas. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas yaitu:

Pada literatur yang berjudul “*The Politics of Deforestation in Indonesia*” (Dauvergne, 2004). Dalam literatur ini menjelaskan terkait Dalam literatur ini menjelaskan terkait bentuk politik dari pemerintahan Indonesia dalam mencari solusi terkait deforestasi. Adanya laju dan penyebab deforestasi yang terjadi di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak yang kompleks. Sehingga deforestasi yang terjadi telah menimbulkan masalah-masalah harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia.

Jurnal yang berjudul “*Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*” (Tacconi, 2003), menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, biaya yang dikeluarkan, dan dampak kebijakan yang terjadi. Di mana kebakaran hutan disebabkan oleh masalah kebijakan yang terkait dengan kebakaran

hutan itu sendiri. Sehingga terjadinya kebakaran hutan menyebabkan permasalahan semakin kompleks dan mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah kebakaran hutan dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat agar tidak terjadi permasalahan yang terus-menerus.

Jurnal yang berjudul “*Pembentukan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*” (Syaifulloh, Susilo, & Soelistijono, 2013), menjelaskan terkait isu tentang pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan yang mana organisasi regional memiliki peranan dalam membuat perjanjian dengan negara anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan. Sehingga negara-negara anggota membuat perjanjian secara bersama-sama melalui ASEAN dalam menangani permasalahan kabut asap lintas negara yang telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan di Asia Tenggara.

Literatur yang berjudul “*Hazy Days: Forest Fires and the Politics of Environmental Security Indonesia*” (Edwards & Heiduk, 2015), menjelaskan terkait akibat pembakaran hutan dan dampak buruk yang terjadi di Indonesia melanda wilayah Asia Tenggara. Dengan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia dan *Global Environmental Security* menyatakan perang terhadap kabut asap dan menyerukan penggunaan semua tindakan yang diperlukan dalam menghentikan terjadinya kebakaran hutan yang disengaja. Namun, pemerintah Indonesia hanya mampu sedikit dalam mencegah kebakaran hutan yang terjadi atau menuntut para pelaku pembakaran hutan tersebut. Sehingga dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa dengan adanya tindakan tersebut, maka sekuritisasi

yang dilakukan tidak begitu berhasil karena latar belakang yang dimiliki oleh Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas.

Pada literatur yang berjudul "*Indonesia has Ratified the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Will the Haze Disappear?*" (Sambodo, 2015), menjelaskan terkait kebakaran hutan dan kabut asap yang menjadi salah satu tantangan pada sektor lingkungan di Asia Tenggara. Di mana Indonesia telah menjadi sumber utama adanya kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Sehingga pada Indonesia meratifikasi perjanjian *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* pada bulan September 2014.

Literatur yang berjudul "*After Indonesia Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environment Governance Tool*" (Heilmann, 2015), menjelaskan terkait pada tanggal 20 Januari 2015 Indonesia menyerahkan instrumen ratifikasi untuk *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* ke Sekretariat ASEAN. Di mana Indonesia merupakan negara anggota ASEAN terakhir yang bergabung dalam perjanjian tersebut. Dalam literatur ini berpendapat bahwa ratifikasi Indonesia tidak akan menjadi pengubah perjanjian ini. Sebab mekanisme perjanjian terlalu lemah untuk berkontribusi banyak pada pengurangan polusi kabut asap di wilayah Asia Tenggara. Perjanjian tersebut dirancang sesuai dengan cara ASEAN yang mana pendekatannya tidak mengikat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Sehingga hal ini tidak mungkin bahwa

dalam perjanjian ini akan membawa perubahan bagi negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi.

Dengan demikian, berdasarkan literatur yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan membahas analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi, deforestasi dan kebakaran hutan maupun dampak dari deforestasi dan kebakaran hutan itu sendiri merupakan sebuah permasalahan yang sangat penting. Sehingga menurut penulis, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Di mana dalam hal ini selain adanya respon dari Thailand, juga menimbulkan adanya bekerja sama kedua negara dalam menangani permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

1.7 Landasan Teori

Rational Choice Theory (Decision-Making)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Rational Choice* yang dikeluarkan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Politic: Model of Decision Making Process*. Penulis melihat bahwa teori ini dapat dijadikan sebagai dasar analisis penelitian dan menganalisis kebijakan luar negeri dalam analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). *Decision Making* merupakan suatu pemilihan keputusan atau kebijakan yang mengacu pada kriteria tertentu. Proses pengambilan keputusan ini

meliputi dua alternatif atau lebih namun dalam hal ini hanya dapat memilih satu alternatif (Dagun, 2006, p. 185).

Coplin menjelaskan dalam bukunya mengatakan kebijakan luar negeri merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan.

Dalam bukunya coplin mengatakan:

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” (Azizah, 1992, p. 365).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengidentifikasi ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Pertama, kondisi politik dalam negeri, Kedua, kemampuan ekonomi dan militer, ketiga, pada konteks internasional yang dimana hal ini terkait posisi negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Dalam pertimbangan yang pertama, kondisi politik dalam negeri meliputi interaksi para aktor yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan atau disebut sebagai *Policy Influencers* diantaranya yaitu partai politik, birokrat, pemangku kepentingan dan media massa.

Coplin juga menjelaskan dalam pembuatan kebijakan luar negeri setidaknya menekankan pada tiga indikator. Pertama, peran atas kepentingan yang dimiliki kelompok, birokrat sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan pada level politik dalam negeri, dan partai politik. Selain itu coplin mengatakan bahwa kelompok kepentingan memiliki peran besar dalam sistem politik yang terbuka di suatu negara. Namun, hal tersebut bukan menjadi asumsi bahwa kelompok tersebut selalu menjadi penentu kebijakan yang utama dari suatu desan kebijakan ekonomi negara. Sebaliknya, dengan menggunakan sistem politik yang terbuka tentu turut serta memungkinkan kelompok kepentingan memiliki peran yang cukup terbatas dalam

memanfaatkan pengaruhnya di suatu negara. Begitupun hal yang sama juga dapat terlihat dari peran partai politik di negara yang memiliki sistem politik terbuka.

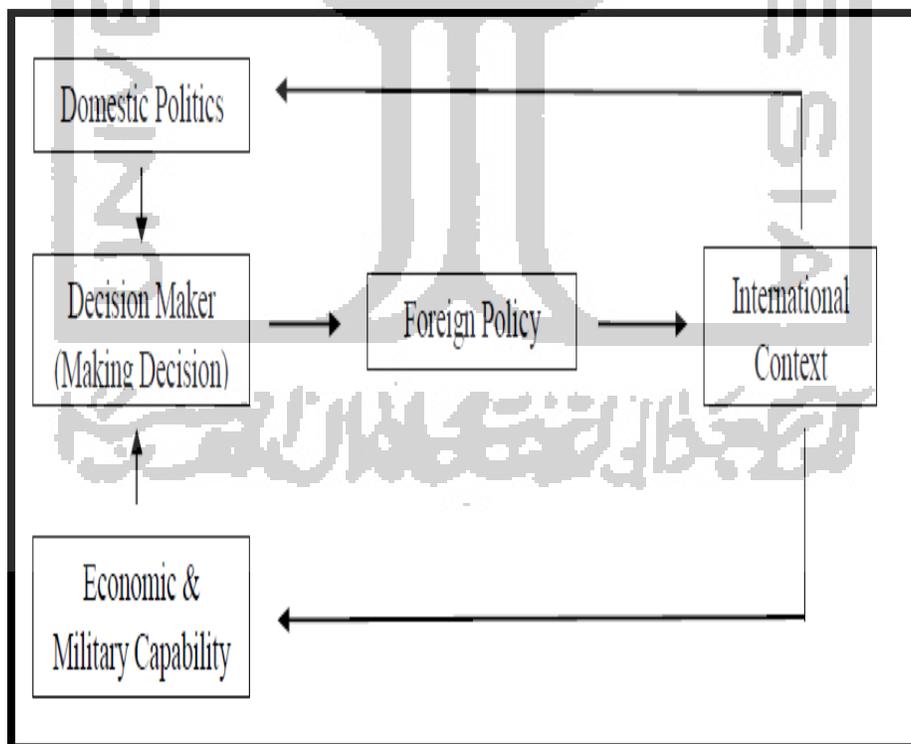
Pada aspek yang kedua yaitu kekuatan ekonomi dan militer. Untuk kekuatan ekonomi sendiri memiliki beberapa aspek diantaranya adalah sejarah perkembangan kondisi ekonomi negara, kapasitas produksi nasional dan ketergantungan negara terhadap perdagangan internasional. Sejarah perkembangan ekonomi memiliki peran yang besar untuk bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam hal ini ekonomi selain itu juga dapat mengukur kapasitas produksi barang ekspor. Lalu untuk aspek kekuatan militer, diukur melalui peran kapasitas dalam penggunaan kekuatan militer dan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup untuk membentuk arah kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Pada aspek yang terakhir berikutnya adalah melalui dimensi yang berbeda dari aspek pertimbangan pertama dan kedua. Dinamika dalam negeri yang pada dasarnya diukur melalui politik dalam negeri dan kekuatan ekonomi serta militer maka untuk konteks internasional memiliki pertimbangan yang berbeda. Pertimbangannya merupakan dimensi luar negeri yang memiliki pengaruh terhadap politik luar negeri itu sendiri. Dengan demikian sifat lingkup internasional yang disertai dengan hubungan antar negara terhadap situasi-situasi pada sistem internasional yang menentukan bagaimana nantinya negara akan mengambil sikap. Coplin sendiri dalam bukunya menjelaskan bahwa ada tiga aspek berikutnya yang terdiri dari aspek ekonomi, politis, dan geografis. Kemudian letak geografis yang berhubungan dengan perdagangan antar negara dan keanggotaan dengan organisasi antar pemerintah.

Selain itu, aspek ekonomi juga memiliki peran penting dalam lingkup internasional. Pergerakan arus barang dan jasa ataupun modal membuat pola ketergantungan suatu negara

dengan negara lainnya dan dalam segi politis digambarkan dengan hubungan politik terhadap suatu negara dengan negara lain memiliki peran signifikan dalam politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini Coplin menyebutkan kerjasama keamanan memberikan dampak yang cukup besar terhadap anggota atau non-anggota aliansi dalam merumuskan suatu kebijakan politik luar negeri. Semua pertimbangan tersebut tentu berperan atas saling terhubungnya setiap pertimbangan tersebut terhadap para penentu kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut dikarenakan dalam lingkup politik dalam negeri, kedua kekuatan yaitu ekonomi dan militer mempunyai peran yang kuat dan sama dalam membentuk kebijakan politik luar negeri suatu negara. Artinya, ketiga pertimbangan tersebut memberikan kesinambungan dalam hal pengaruh satu sama lain.

Dibawah ini merupakan gambaran pola mengenai bagaimana proses dalam pengambilan kebijakan suatu negara yang dipaparkan oleh Coplin dalam bukunya, yaitu:



Gambar 1: Proses Pengambilan Kebijakan (Coplin, 1992).

Dengan demikian, penulis melihat bahwa teori ini sangat cocok digunakan sebagai dasar analisis dari penelitian ini. Dalam teori ini memberikan gambaran bagaimana suatu negara dalam berproses dan menentukan suatu pengambilan keputusan dalam kebijakan melalui indikator-indikator yang dijelaskan di dalam teori tersebut. Thailand sebagai aktor negara mengeluarkan kebijakan mengenai analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sebab dampak yang diterima Thailand akibat kabut asap lintas batas negara yang berasal dari Indonesia sangat signifikan. Penulis mengklasifikasikan dengan menggunakan pendekatan teori ini yaitu dengan melihat melalui tiga indikator dalam teori *rational choice*, yaitu:

a. Kondisi politik dalam negeri

Dalam aspek ini, kondisi politik dalam negeri mempengaruhi bagaimana keputusan Thailand untuk mengeluarkan kebijakan mengenai analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Adapun aspek politik dalam negeri meliputi kelompok kepentingan, partai politik dan birokrat sebagai aktor yang paling memiliki peran dalam menentukan kebijakan politik dalam negeri. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada aspek kelompok kepentingan, partai politik, birokrat dan media massa yang mampu mendorong dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah Thailand.

b. Kondisi ekonomi dan militer

Kondisi ekonomi dan militer Thailand mempengaruhi keputusan Thailand terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Penulis perlu mencari

tahu bagaimana kondisi ekonomi dan militer Thailand. Maka dari itu, membutuhkan kondisi ekonomi yang kuat bagi Thailand. Sedangkan dalam segi militer, Thailand tidak terlalu membutuhkan alutista yang kuat. Hal tersebut dikarenakan permasalahan kabut asap lintas batas negara bukan suatu permasalahan yang berdampak pada kekuatan militer. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan nanti mampu menciptakan negosiasi untuk menangani kondisi ekonomi Thailand.

c. Konteks internasional

Dalam aspek ini mencoba untuk memberikan pertimbangan yang akan mendorong bagaimana Thailand akan mengeluarkan kebijakan atau keputusan dalam penelitian ini. Pada tahun 2015, kondisi asap yang sampai melewati lintas batas negara cukup parah. Namun, hal tersebut memberikan dampak positif maupun negatif. Dalam hal positif, Thailand dapat memperkuat hubungannya dengan Indonesia. Sedangkan, dampak negatif yang dialami yaitu mengalami beberapa kerugian. Solusi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa teori *rational choice* sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Bagaimana teori ini akan melihat permasalahan kabut asap lintas batas negara untuk menganalisis terkait *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*. Sebab permasalahan ini sangat berpengaruh bagi Thailand baik kondisi internal maupun eksternal dalam pembuatan kebijakan luar negerinya mengenai dampak yang diterimanya akibat kabut asap lintas batas negara yang berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis untuk menganalisis dan menjawab penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang secara garis besar data dalam penelitiannya berdasarkan data interview, observasi, dan dokumen atau teks yang kemudian dipelajari dan di narasikan (Parwito, 2007, p. 96). Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan. Di mana sumber dari studi kepustakaan dapat diperoleh melalui jurnal-jurnal, buku-buku, berita, serta data-data yang data dijakian referensi yang valid.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam peneltian, subjek penelitian merupakan salah satu bagian yang tidak dapat didapat dipisahkan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis dalam penelitian ini memilikisubjek penelitian yaitu Thailand. Sehingga dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara spesifik dari analisa yang dilakukan terkait analisis *decision making process* terhadap kebijakan Thailand mendorong Indonesia menerapkan perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu pada data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Data sekunder ini dapat dilakukan dengan metode pengumpulan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, berita, internet dan dokumen lainnya. Sehingga data-data tersebut akan dikumpulkan penulis untuk dilakukan

studi kepustakaan agar data-data tersebut dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan data-data yang ada.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis dalam proses penelitian, sudah dijelaskan di atas bahwa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini, tahapan-tahapan proses penelitiannya yaitu: *Pertama*, melakukan studi kepustakaan yang akan digunakan untuk mencari referensi atau sumber dalam penelitian ini. *Kedua*, dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal, artikel, berita, laporan resmi, dan sumber lainnya yang dirasa valid untuk digunakan. Sehingga dengan data tersebut akan dijadikan penulis sebagai bahan pendukung dalam penelitian, sekaligus bertujuan untuk memperkuat bukti dari penelitian ini bahwa data yang digunakan merupakan data yang valid. Kemudian setelah itu, data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisa oleh penulis secara mendalam untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.